

TATA CARA PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT PENGUNGSIAN ERUPSI GUNUNG SEMERU KABUPATEN LUMAJANG

by lidya uinsa

Submission date: 11-Dec-2023 11:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 2255704134

File name: 16.pdf (2.08M)

Word count: 4813

Character count: 31908



Book Chapter Abdimas
Ekonomi, Ilmu Administrasi,
Ilmu Komunikasi, dan Hukum



Padamu Negeri Kami Mengabdikan

JILID

2

Editor :

Sayyidatul Khoiridah

Dian Ferriswara

Ika Devy Pramudiana

Fedianty Augustinah

Veronika Nugraheni Sri Lestari

Dwi Cahyono



Book Chapter Abdimas
Ekonomi, Ilmu Administrasi,
Ilmu Komunikasi, dan Hukum



Padamu Negeri Kami Mengabdi

JILID 2

Editor :
Sayyidatul Khoiridah
Dian Ferriswara
Ika Devy Pramudiana
Fedianty Augustinah
Veronika Nugraheni Sri Lestari
Dwi Cahyono

JILID 2

PADAMU NEGERI KAMI MENGABDI

(Ekonomi, Ilmu Administrasi, Ilmu Komunikasi, dan Hukum)

Editor:

**Sayyidatul Khoiridah, Dian Ferriswara, Ika Devy Pramudiana,
Fedianty Augustinah, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Dwi Cahyono.**

Layouter:

Dewi

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2022

Penerbit



UNITOMO PRESS

Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia

press@unitomo.ac.id

Telp: (031) 592 5970

Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama : Februari 2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : x + 266 halaman

Anggota IKAPI: 227/ALB/JTI/2019

ISBN: 978-623-6665-24-4 (jil.2 PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan atau tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KONTRIBUTOR

Siti Naviah, Samsul Huda, Fedianty Augustinah, Siti Marwiyah, Vieta Imelda Cornelis, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana, Sri Roekminiati, Sarwani, Andry Herawati, Liling Listyawati, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Masnunah, Dwi Cahyono, Nurmawati, Mustika Winedar, Nur Sayidah, Shanty Ratna Damayanti, Jajuk Suprijati, Alvy Mulyaning Tyas, Sutarmin, Sugiyanto, Wiwik Budiarti, Wella Sandria, Arniwita Sy, Adi Putra, Dian Ferriswara, Sri Kamariyah, Widyawati, Cicilia Tantri Suryawati, Putut handoko, Cahyaningsih Pujimahanani, Safrin Zuraidah, Achmad Chiron, Achmad Kusyairi, Sumaryam, Raden Hartopo Eko Putro, Damajanti Sri Lestari, Eny Haryati, Sapto Pramono, Hendro Wardhono, Priyanto, M. Syahrul Borman, Susi Ratnawati, Nurul Umi Ati, Cahyaning Umul Chasanah Nursyifani, Kus Indarto, Irwantoro, Lukman Arief, Anggraeni Rahmasari, Redi Panuju, Budi Santoso, R. Ayu Erni Jusnita, Sanhari Prawiradiredja, Syaiful Hidayat, Farida, Subekti, Sri Astutik, Galuh Lintang Taslim, Ratnaningsih, dan Sudjatmiko

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, anugerah dan perkenan-Nya, maka luaran dalam bentuk buku bunga rampai atau book chapter kumpulan hasil pengabdian masyarakat dosen-dosen baik dari internal maupun eksternal Universitas Dr. Soetomo Surabaya volume ke-2 ini dengan judul “Padamu Negeri Kami Mengabdi” dapat terselesaikan.

Buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Unitomo Press (UP) sebagai leading sektor dalam hal penerbitan buku sekaligus penggagas dari penerbitan book chapter “Padamu Negeri Kami Mengabdi”. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua dosen yang telah memberikan sumbangan pemikiran atas kegiatan pengabdian masyarakatnya yang dikemas dalam bentuk artikel pada book chapter ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua dekan di masing-masing perguruan tinggi yang telah mensupport kegiatan pengabdian dosen sampai dengan penerbitan book chapter ini. Kami berharap hasil luaran berupa book chapter pengabdian ini memberikan nilai kemanfaatan terutama dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dosen saat ini dan di masa yang akan datang.



Book chapter “Padamu Negeri Kami Mengabdikan” terbagi menjadi dua lingkup buku. Lingkup pertama berisi tentang aspek pendidikan, teknologi, kesehatan, pertanian, perikanan, dan pangan. Lingkup kedua berisi tentang aspek ekonomi, ilmu administrasi, ilmu komunikasi, dan hukum. Semoga dengan terbitnya book chapter ini mampu membangkitkan semangat dalam menerbitkan buku-buku selanjutnya dan semoga menjadi motivasi bagi para dosen untuk selalu menulis dan menerbitkan karyanya dalam bentuk buku. Karena dosen yang profesional adalah dosen yang kreatif dalam pengajaran serta mampu meneliti dan mengabdikan, yang mana hasil penelitian maupun pengabdianannya dapat dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah maupun buku seperti ini.

Akhir kata semoga Allah Yang Maha Kuasa melimpahkan kasih dan berkahnya kepada kita semuanya, Aamiin.

Surabaya, Februari 2022
Rektor Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KONTRIBUTOR.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAGIAN PERTAMA: EKONOMI

A. PENDAMPINGAN MENEJEMEN USAHA AYAM RAS PEDAGING (BROILER) KABUPATEN LAMONGAN (Oleh: Siti Naviah dan Samsul Huda)	1
B. PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PERKOTAAN DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN KELUARGA (Oleh: Fedianty Augustinah, Siti Marwiyah, dan Vieta Imelda Cornelis)	13
C. PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK DIGITAL MARKETING SAAT PANDEMI COVID-19 BAGI WIRUSAHA DI KABUPATEN PAMEKASAN (Oleh: Fedianty Augustinah, Nihayatus Sholichah, Ika Devy Pramudiana, dan Sri Roekminiati)	27
D. SOSIALISASI PEMASARAN ONLINE DAN MOTIVASI PELAKU USAHA MIKRO DI SENTRA WISATA KULINER PENJARINGANSARI SURABAYA (Oleh: Sarwani, Andry Herawati, dan Liling Listyawati)	41
E. PENDAMPINGAN MASYARAKAT PADA USAHA AYAM PETELUR DI DESA BANDANG DAJAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA (Oleh: Veronika Nugraheni Sri Lestari, Masnunah, Dwi Cahyono, dan Nurmawati)	57

- F. Penguatan Rantai Pasokan Unit Toko Koperasi Wanita Medokan Ayu untuk Meningkatkan Penjualan di Tengah Pandemi COVID-19
(Oleh: Mustika Winedar, Nur Sayidah, Shanty Ratna Damayanti, Jajuk Suprijati, dan Alvy Mulyaning Tyas) 67
- G. Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Ekonomi sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Hulu Das Brantas Desa Tawang Sari, Pujon, Malang
(Oleh: Sutarmin, Sugiyanto, dan Wiwik Budiarti) 81
- H. Peningkatan Kreativitas Berwirausaha Kelompok Wanita Tani (KWT) Puspa Indah di RT.06 Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Baru, Kota Jambi
(Oleh: Wella Sandria, Arniwita Sy, dan Adi Putra) 95

BAGIAN KEDUA: ILMU ADMINISTRASI

- A. Pemberdayaan Pengelolaan Agro Wisata D'Ganjaran Sambibulu Bumdes Sambi Madu Desa Sambibulu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
(Oleh: Dian Ferriswara, Sri Kamariyah, dan Widyawati) 105
- B. Pariwisata Sumber Dhuwur Desa Wonosari Mojokerto
(Oleh: Cicilia Tantri Suryawati, Putut Handoko, dan Cahyaningsih Pujimahanani) 121
- C. Desa Tangguh Bencana di Desa Bumi Aji Kecamatan Sumber Brantas Kota Batu
(Oleh: Safrin Zuraidah, Achmad Choiron, Achmad Kusyairi, Sumaryam, dan Hartopo Eko Putro)..... 131
- D. Sosialisasi Peran Puskesmas dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Batu
(Oleh: Damajanti Sri Lestari, Andry Herawati, Liling Listyawati, Nihayatus Sholichah, dan Sri Kamariyah) 139

- E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERDAMPAK
RISIKO BENCANA MELALUI PEMAHAMAN DASAR-
DASAR MITIGASI BENCANA DI SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA 05 KOTA BATU
(Oleh: Eny Haryati, Spto Pramono, Sri Roekminiati, Dian
Ferriswara, dan Widyawati) 157
- F. MODEL PEMULIHAN SOSIAL EKONOMI PASCA
BENCANA BANJIR BANDANG DI KOTA BATU
(Oleh: Hendro Wardhono, Priyanto, Siti Marwiyah,
M. Syahrul Borman, dan Safrin Zuraidah) 173
- G. MELESTARIKAN BATIK TULIS ASLI SIDOARJO
SEBAGAI WARISAN BUDAYA DAERAH
(Oleh: Susi Ratnawati, Nurul Umi Ati, Cahyaning Umul
Chasanah Nursyifani, dan Kus Indarto)..... 187
- H. PENGEMBANGAN PESANTRENPRENUER
BERBASIS PENERAPAN BUDIDAYA AYAM
KAMPUNG UNGGUL
(Oleh: Irwantoro, Lukman Arief, dan Anggraeni Rahmasari) .. 195

BAGIAN KETIGA: ILMU KOMUNIKASI

- A. PEMBUATAN DAN PENGEMBANGAN *WEBSITE*
DESA PADUSAN KECAMATAN PACET KABUPATEN
MOJOKERTO
(Oleh: Redi Panuju, Budi Santoso, R. Hartopo Eko Putro,
R. Ayu Erni Jusnita, Sanhari Prawiradiredja)..... 207
- B. PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM
KOMUNIKASI PUBLIK MELALUI KAMPANYE
SOSIAL DAN KREASI KONTEN MEDIA
(Oleh: Sanhari Prawiradiredja, Redi Panuju, Syaiful Hidayat,
Farida)..... 219

BAGIAN KEEMPAT: HUKUM

- A. HAK ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
(Oleh: Subekti, Sri Astutik, dan Galuh Lintang Taslim) 231

B.	TATA CARA PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT PENGUNGSIAN ERUPSI GUNUNG SEMERU KABUPATEN LUMAJANG (Oleh: Siti Marwiyah, Hendro Wardhono, Nur Sayidah, Priyanto, M. Syahrul Borman)	241
C.	PENDAMPINGAN AKADEMISI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISABILITAS DI KABUPATEN LUMAJANG (Oleh: Ratnaningsih dan Sudjatmiko).....	259

TATA CARA PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT PENGUNGSIAN ERUPSI GUNUNG SEMERU KABUPATEN LUMAJANG

**Siti Marwiyah¹, Hendro Wardhono², Nur Sayidah³, Priyanto⁴,
M. Syahrul Borman⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Email: ^{1*}siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id,

²hendro.wardono@unitomo.ac.id, ³nur.sayidah@unitomo.ac.id,

⁴priyanto@unitomo.ac.id,

⁵msyahrul.bormansh@unitomo.ac.id

1. Pendahuluan

Indonesia yang berada di kawasan *ring of fire* yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah berpotensi rawan bencana dan sering mengalami kejadian bencana, baik bencana alam, bencana non alam, ataupun bencana sosial. Untuk itu, diperlukan upaya penanganan yang cepat dan tepat sasaran guna mengurangi timbulnya dampak lebih buruk, khususnya bagi korban bencana yang terpaksa harus menjadi pengungsi dan direlokasi.

Dalam kondisi dan situasi darurat bencana, pelayanan dan penanganan pengungsi masih sering terjadi adanya kesimpang siuran data dan informasi menyangkut jumlah korban, jumlah pengungsi dan atau kerusakan serta jenis dan bentuk kebutuhan yang diperlukan di lokasi-lokasi pengungsian yang pada akhirnya dapat mempersulit upaya penanganan, pengambilan kebijakan, dan kegiatan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat kebutuhannya. Institusi dan atau lembaga penanganan pengungsi di tempat pengungsian bisa berdiri sendiri dan atau menjadi bagian dari kegiatan tanggap darurat sesuai Peraturan Kepala BNPB (Perka No.14 Tahun 2010). Dengan demikian, pos komando tanggap darurat bencana dapat dan perlu dilengkapi dengan pusat pelayanan dan penanganan pengungsi serta relokasi yang merupakan satu kesatuan sistem penanganan tanggap darurat bencana, dengan dilengkapi pedoman/tatacara pembagian peran dan tanggungjawab.

Apabila merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang-Wilayah, maka harus sudah dirancang wilayah-wilayah yang perlu kewaspadaan karena masuk dalam kawasan rawan bencana.

2. Kajian Teori

2.1 Undang-Undang penanggulangan bencana

Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedang yang dimaksud bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. Sementara yang dimaksud bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Adapun bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok dan atau antarkomunitas masyarakat serta teror.

UU Nomor 24 Tahun 2007 juga memuat pengertian tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

2.2 Kemungkinan dampak bencana

Pertemuan dari faktor-faktor ancaman bencana/bahaya dan kerentanan masyarakat akan dapat memposisikan masyarakat dan daerah yang bersangkutan pada tingkatan risiko yang berbeda.

Hubungan antara ancaman, kerentanan dan kemampuan dapat digambarkan sebagai berikut

$$\frac{\text{Ancaman} \times \text{Kerentanan}}{\text{Kemampuan}} = \text{RISIKO BENCANA}$$

3

Semakin tinggi ancaman bahaya dan kerentanan di suatu daerah, maka akan semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Berikut rincian perkiraan kemungkinan (*probabilitas*) terjadinya ancaman bencana:

- 5 pasti (hampir dipastikan 80 - 99%);
- 4 kemungkinan besar (60 – 80% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 10 tahun mendatang);
- 3 kemungkinan terjadi (40-60% terjadi tahun depan, atau sekali dalam 100 tahun);
- 2 kemungkinan Kecil (20 – 40% dalam 100 tahun);
- 1 kemungkinan sangat kecil (hingga 20%).

Jika probabilitas di atas dilengkapi dengan perkiraan dampak, maka apabila bencana itu memang terjadi dengan pertimbangan faktor dampak antara lain:

- jumlah korban;
- kerugian harta benda;
- kerusakan prasarana dan sarana;
- cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
- dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Dengan formula sederhana tersebut, maka jika dampak ini pun diberi bobot dapat dirumuskan simpul resiko bencana yang akan terjadi dengan kriteria sebagai berikut:

- 5 sangat parah → (80% - 99% wilayah hancur dan lumpuh total);
- 4 parah → (60 – 80% wilayah hancur);
- 3 sedang → (40 - 60 % wilayah terkena berusak);
- 2 ringan → (20 – 40% wilayah yang rusak);
- 1 sangat ringan → (kurang dari 20% wilayah rusak).

3. Metode Pelaksanaan

3.1 Tindakan penanggulangan bencana

3.1.1 Pencegahan dan mitigasi

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi pasif antara lain:

1. penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah;
3. pembuatan pedoman/standar/prosedur;
4. pembuatan brosur/leaflet/poster;
5. penelitian/pengkajian karakteristik bencana;
6. pengkajian/analisis risiko bencana;
7. internalisasi penanggulangan bencana dalam muatan lokal pendidikan;
8. pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana;
9. penguatan unit-unit sosial dalam masyarakat, seperti forum;
10. pengarus-utamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan.

Sedang tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain sebagai berikut.

1. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana dan sebagainya.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan tentang penataan ruang, ijin mendirikan bangunan (IMB), dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana.
3. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat.
4. Pindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman.
5. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
6. Perencanaan daerah penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana.
7. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh

bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, bangunan tahan gempa dan sejenisnya.

4

3.1.2 Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada saat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi.

3.1.3 Tanggap darurat

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

3.1.4 Pemulihan

Upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali.

3.1.5 Rekonstruksi

Sedang tahap rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Tujuan dari sebuah permasalahan evakuasi dapat dinyatakan sebagai minimasi waktu yang dibutuhkan untuk meng-evakuasi atau maksimasi jumlah orang yang dapat dievakuasi dalam sebuah bentang waktu T yang diberikan. Tujuan yang disebut terakhir itu dapat pula dinyatakan sebagai maksimasi arus dinamis (*dynamic flow*) yang mencapai *sink node* (dalam kasus di atas, simpul 4) pada periode T . Dengan demikian, permasalahan dengan fungsi

tujuan seperti itu disebut pula *maximum dynamic flow problem* (MDFP). MDFP dapat diselesaikan dengan pendekatan yang disebut *temporally repeated flow technique*.

Berkenaan dengan hal itu, maka masalah organisasi, struktur dan perilakunya untuk kegiatan dan penanganan pengungsian, menjadi penting ditinjau dari sisi metodologi untuk menganalisis dan menetapkan organisasi seperti apa yang dibutuhkan di dalam kegiatan di tempat pengungsian. Dalam tinjauan lain menyangkut bagaimana sisi Logistik dan *Supply Chain* Bencana Alam, dapat diandalkan sebagai bagian dari pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, Hadiguna, (2010) dalam artikel kebencanaan menulis tentang pentingnya Riset Operasi (*Operation Research*) dan keterlibatan dunia akademisi untuk ikut memecahkan permasalahan logistik dan rantai pembagiannya. Menurutnya masalah logistik bencana tidak sederhana apabila kita memahami ukuran kinerja dan kendala yang dihadapi. Kompleksitas logistik bencana telah menarik perhatian para akademisi dari universitas terkemuka di dunia seperti *Massachusetts Institute of Technology* (MIT), serta lembaga lainnya seperti *Humanitarian Logistic Initiative* atau *Center for Humanitarian Supply Chain Management* di Georgia Institute of Technology. Selain itu, berbagai penelitian tentang logistik bencana alam juga telah dipublikasikan pada berkala ilmiah internasional diantaranya masalah *lokasi fasilitas* (2008), *Manajemen Supply Chain Bantuan Bencana* (2008), *Mengukur Kinerja Logistik Bencana* (2009) yang pada umumnya telah menerapkan model matematik Riset Operasi dengan pemanfaatan teknologi komputer sebagai sistem pendukung keputusan (*decision support system*).

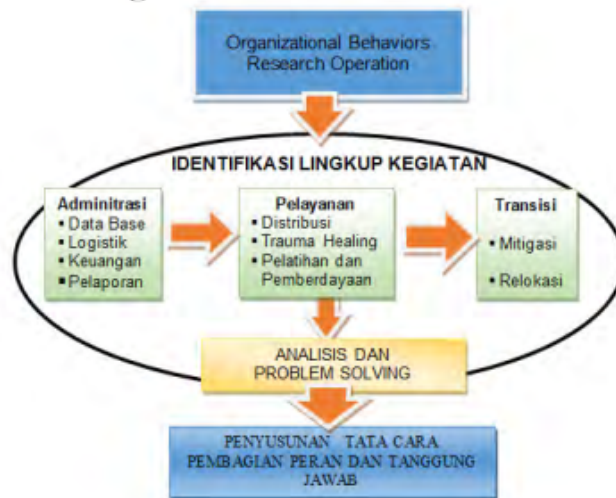
3. Metode Pelaksanaan

Berkenaan dengan Penyusunan Pembagian Peran dan Tanggung-jawab Di Tempat Pengungsian, maka dibuat terlebih dahulu kerangka kerja penyusunan sebagai berikut.

1. Melakukan identifikasi kegiatan dan atau tugas serta tanggung jawab yang diperlukan pada saat penanganan pengungsi, baik yang berada di tempat-tempat pengungsian maupun yang masih bertahan di tempat di mana bencana terjadi.

2. Merumuskan tata cara pembagian peran dan tanggungjawab serta standar operasional prosedur dan standar fasilitas dasar yang diperlukan organisasi di lokasi-lokasi pengungsian.
3. Melakukan identifikasi ketersediaan data dan kebutuhan minimum yang diperlukan di tempat-tempat pengungsian akibat bencana, baik untuk kebutuhan dasar bagi korban dan atau kebutuhan dasar bagi organisasi pengungsian.
4. Merumuskan jenis kegiatan dengan beberapa skenario kegiatan pokok yang mungkin terjadi dan harus dilaksanakan.

Kerangka kerja sebagaimana dimaksud di atas, disusun dalam sebuah skema model kerangka kerja Penyusunan Pembagian Peran dan Tanggungjawab Di Dalam Organisasi Di Tempat Pengungsian, yang digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Skema Kerangka Kerja Penyusunan Pembagian Peran dan Tanggungjawab Dalam Organisasi Di Tempat Pengungsian

Berikut penjelasan skema kerangka kerja.

- A. Kerangka kerja Penyusunan Peran dan Tanggung Jawab dilandasi dengan dua model pendekatan ‘ 1) Perilaku Organisasi dan 2) Riset Operasi. Pendekatan ini digunakan karena dalam kegiatan di tempat pengungsian diperlukan organisasi formal yang memiliki struktur, pembagian peran, tugas dan tanggung jawab yang jelas diantara orang dan atau lembaga yang terlibat di dalam penanganan dan pelayanan pengungsi.

Riset Operasi sebagai model, merupakan pendekatan yang perlu dipertimbangkan implementasinya, mengingat setiap kegiatan pelayanan pengungsi seperti ; evakuasi atau relokasi, distribusi logistik dan manajemen persediaan, perlu perhitungan tepat.

- B. Identifikasi Lingkup Kegiatan ; Diperkirakan ada 3(tiga) jenis kegiatan utama sebagai *Job Description* di dalam pelayanan kepada pengungsi, diantaranya adalah :
- Kegiatan Administrasi, meliputi ; Pembentukan dan pengelolaan data base pengungsi, Pengelolaan Logistik bagi pengungsi, Keuangan dan Pelaporan.
 - Pelayanan Pengungsi, meliputi ; Distribusi atau penyaluran logistik kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, Pelayanan konseling (*trauma healing*), Pelatihan ketrampilan dan atau Pendampingan sebagai upaya pemberdayaan, dan kegiatan pada saat relokasi pengungsi.
 - Transisi, masa di mana kegiatan pelayanan kepada pengungsi akan berakhir, maka pengelola pengungsian menyiapkan data bagi pihak yang membutuhkan untuk upaya Mitigasi (Struktural dan atau Non Struktural) dan kegiatan Relokasi pengungsi.
- C. Analisis dan Problem Solving, dilakukan dengan menginventarisir secara rinci jenis kegiatan yang ada dari ke tiga kegiatan utama, dan memetakan pola pembagian peran dan tanggung jawab.
- D. Penyusunan Pembagian Peran dan Tanggungjawab, sesuai dengan struktur organisasi pengelola pengungsi (SOPP) yang telah dibuat dengan jenis kegiatan dan tanggungjawabnya.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam *World Risk Report* (2016), Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat keterpaparan (*exposure*) dan kerentanan (*vulnerability*) terhadap bencana. Bahkan hampir 75% infrastruktur industri dan konektivitas dasar di Indonesia, termasuk sarana pendukungnya dibangun pada zona rawan bencana.



Gambar. 2 Peristiwa Bencana di Indonesia Sepanjang tahun 2020
Sumber: Geoportal Data Bencana Indonesia (BNPB 2021)

Pada 4 Desember 2021, Gunung Semeru erupsi yang mengagetkan semua pihak, oleh karena terjadi secara tiba-tiba dan sistem peringatan dini diduga kurang berfungsi secara optimal.



Gambar 3. Update Laporan Situasi Penanganan Darurat Semeru
Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur (11 Des 2021)

Penanganan darurat bencana erupsi Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur menjadi menarik untuk dikaji dan dianalisa. Hal ini dikarenakan menerapkan sistem manajemen darurat

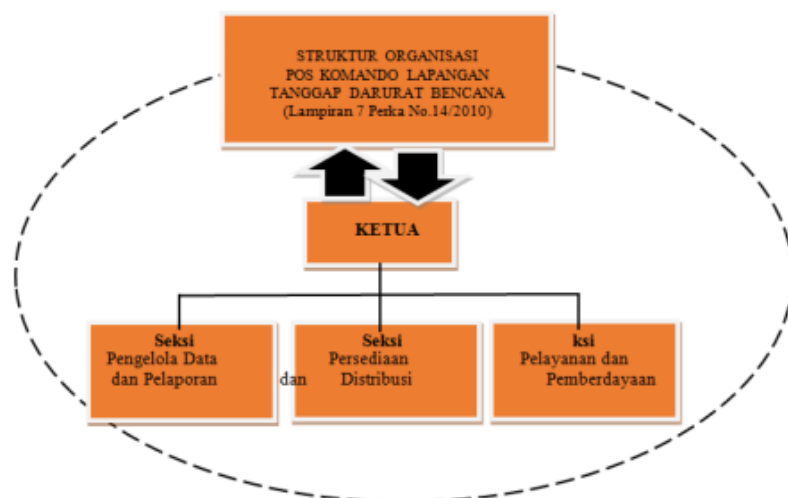
bencana yang cukup unik yaitu melalui pelibatan *multi-stakeholder* dan ditunjuk Komandan Korem sebagai Dan Satgas dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Dengan tetap merujuk pada data diatas, bahwa Gunung Semeru meletus pada Sabtu, 4 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WIB dan mengeluarkan Awan Panas Guguran (APG). Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan bahwa jarak luncur awan panas guguran Gunung Semeru mencapai hingga 11 kilometer. Salah satu yang saat ini masih belum jelas adalah terkait dengan sistem peringatan dini yang tidak terkomunikasikan dengan baik dengan warga sekitar dan diduga info peringatan dini yang disampaikan tidak diterima dengan 'tepat waktu' oleh warga setempat.

4.1 Pemetaan kapasitas dan organisasi

Pemetaan kapasitas dan kebutuhan organisasi di tempat pengungsian dan kapasitas sumberdaya pendukung perlu dilakukan mengingat dalam masa Tanggap Darurat Bencana akan selalu berdampak kepada munculnya pengungsi dan tempat-tempat pengungsian. Namun, jika ditinjau dari sisi struktur organisasi yang secara khusus menampung tugas dan fungsi penanganan dan melayani pengungsi secara formal belum ada atau belum terpolakan sebagaimana yang dimaksud di dalam Tanggap Darurat Bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB (Perka) Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.

Ketiadaan struktur organisasi pos komando (posko) pengungsi diduga menjadi penyebab timbulnya kesimpangsiuran penanganan, karena tidak adanya kejelasan pengaturan dan pembagian peran serta tanggungjawab sesuai kompetensi dan bidang tugas yang terstruktur dalam bentuk organisasi. Sehingga pelayanan kepada pengungsi menjadi lambat serta memunculkan komplain dan ketidakpuasan.

Berangkat dari uraian di atas, maka struktur organisasi pengelolaan pengungsi atau Posko Pengungsi, disusun sebagai dasar untuk menetapkan pembagian peran dan tanggungjawab di tempat pengungsian, struktur organisasi posko pengungsi menjadi bagian dari Struktur Organisasi Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana sesuai Perka No.14/2010, dan disusun dalam skema sebagai berikut.



Gambar 4. Skema Bagan Struktur Organisasi Posko Pengungsi

Seperti Gambar.4, Struktur Organisasi Posko Pengungsi berada di dalam garis komando dan garis koordinasi Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana, dilengkapi 3 (Tiga) Seksi, sebagai *supporting unit* organisasi posko pengungsi, sebagai berikut.

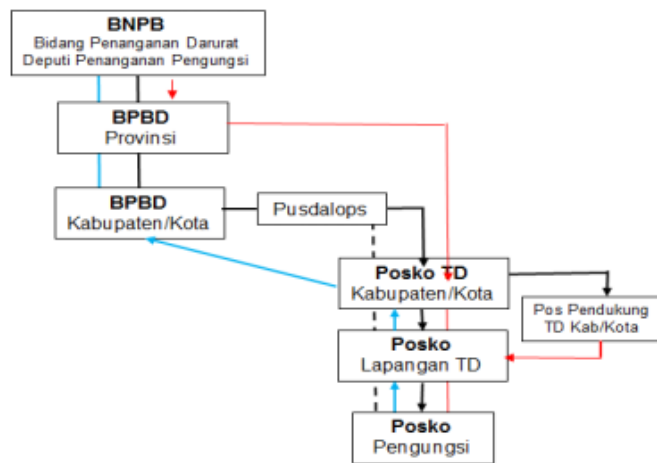
- 1) Seksi Pengelola Data dan Pelaporan; dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
 - Mengelola data pengungsi yang berada di Posko Pengungsi dan secara periodik memperbarui (*update*) data, serta berkoordinasi dengan Sub Bagian Data, Informasi & Komunikasi di Posko Lapangan
 - Pelaporan, seksi ini bertugas menyusun laporan rutin tentang kondisi pengungsi, persediaan dan realisasi distribusi logistik serta laporan insidental tentang masalah-masalah yang terjadi di posko pengungsian yang memerlukan prioritas penanganan.
- 2) Seksi Persediaan dan Distribusi, bertugas: Mengajukan logistik, kebutuhan pengungsi dan posko pengungsi secara berkala kepada Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelola Bantuan di Posko Lapangan, Menyimpan dan mengadministrasikan sebagai persediaan di posko pengungsi, 3. Mendistribusikan kepada pengungsi.
- 3) Seksi Pelayanan dan Pemberdayaan, bertugas memberikan pelayanan bagi para pengungsi dan berkoordinasi dengan Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana, dalam hal ;

Dapur Umum di Posko Pengungsi, Konseling dan pendampingan psikologis (*trauma healing*), Pelayanan kesehatan dan pengobatan secara berkala, Pelatihan ketrampilan dan pemberdayaan kepada pengungsi, Menjaga keselamatan & keamanan di areal posko pengungsi, dengan membentuk PAM Mandiri bersama pengungsi, Menyusun data pengungsi yang siap dikembalikan dan atau direlokasi ke tempat yang telah ditetapkan.

4.2 Mekanisme dan hubungan kerja manajemen pengungsi

1) Masa tanggap darurat bencana

Manajemen dan penanganan pengungsi korban bencana harus melibatkan peran dan tanggung jawab dari berbagai pihak sesuai kewenangan dan tingkatannya, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hubungan, peran dan tanggungjawab diantara berbagai pihak dan tingkatan tersebut perlu secara diatur di dalam mekanisme hubungan kerja, peran dan tanggungjawab pada setiap kegiatan manajemen pengungsi sebagai berikut.



Keterangan :

- = Garis Komando
- - - - -** = Garis Koordinasi
- = Garis Permintaan Bantuan dan Pelaporan
- = Garis Mobilisasi Bantuan

Gambar 5. Bagan Mekanisme Hubungan Kerja Manajemen Pengungsi Pada Masa Tanggap Darurat Bencana

2) Masa transisi darurat

Masa transisi darurat adalah masa di mana pengelolaan dan penanganan pengungsi akan segera berakhir, yang ditandai dengan dimulainya pengembalian atau pemulangan pengungsi ke tempat tinggal semula dan atau akan direlokasi ke tempat-tempat yang dianggap aman dari resiko ancaman bencana. Dalam hubungan ini peran dan tanggungjawab untuk mendukung masa pemulihan dan atau relokasi pengungsi ke tahap kehidupan normal, diatur dengan mekanisme sebagai berikut.

A. Koordinasi kegiatan

Pemulangan dan atau relokasi pengungsi, baik kelokasi Hunian Sementara (Huntara) ataupun ke lokasi Hunia Tetap (Huntap) pada saat status transisi pemulihan harus dapat dilaksanakan dan diterima oleh pengungsi secara tepat tempat dan kualitas untuk kehidupan baru mereka. Berikut peran dan tanggungjawab.

1. Nasional

Otoritas dan peran pemerintah dalam pengelolaan serta pemulangan dan atau relokasi pengungsi dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

2. Daerah

Otoritas pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pemulangan kembali dan atau relokasi pengungsi korban bencana pada saat transisi pemulihan, dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan peran tersebut BPBD mempunyai kemudahan akses dan berkoordinasi dengan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang dapat membantu dalam kegiatan pemulangan kembali dan atau relokasi pengungsi di mana peran yang dapat dilakukan daerah, adalah:

- 1) Pengadaan lahan dan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat relokasi dan hunian para pengungsi.
- 2) Bertanggungjawab atas dukungan fasilitas, pelayanan, personil, peralatan dan bahan atau material lain yang dibutuhkan
- 3) Mengkoordinasikan semua pelayanan dan distribusi lokasi dan fasilitas hunian bagi pengungsi.
- 4) Memelihara hubungan dan mengkoordinasikan dengan semua lembaga yang terlibat dalam kegiatan pemukiman

kembali dan atau relokasi pengungsi dan melaporkan secara periodik kepada kepala BNPB.

Rekomendasi

Mengingat pengelolaan dan pelayanan kepada pengungsi secara struktur belum ada dan tersirat di dalam Struktur Organisasi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/Kota dan ataupun di dalam Struktur Organisasi Pos Komando Lapangan Tanggap Darurat Bencana, padahal jika terjadi bencana dan menimbulkan evakuasi dan pengungsian, akan diperlukan organisasi sebagai wadah untuk menangani dan mengelola pengungsi dengan rincian tugas yang jelas sesuai struktur organisasi, agar tidak menimbulkan masalah saling melempar peran dan tanggung jawab. Untuk itu direkomendasikan agar dibuat Struktur Organisasi Pos Komando Pengungsi dilengkapi dengan rincian tugas pokok dan fungsi serta pembagian peran dan tanggungjawabnya. Mengingat di tingkat pusat (BNPB) ada Direktorat Penanganan Pengungsi, dengan merujuk pada analisis yang sudah terdeskripsikan dimuka serta sejumlah identifikasi masalah dalam manajemen posko pengungsi sebagaimana tersebut diatas, maka untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dalam posko pengungsi, disajikan usulan skema matriks pembagian peran / tugas dan tanggung jawab dalam posko pengungsi yang menggunakan alur atau prinsip-prinsip manajemen yang populer disebut dengan POAC, atau *Planning, Organizing, Actuating and Controlling*.

Referensi

- Mulyono, Sri. (2002). *Riset Operasi*. Jakarta: LPEM UI.
- Hadiguna, Rika Ampuh. (2010). *Logistik dan Supply Chain Bencana Alam*. Fakultas Teknik Industri Universitas Andalas.
- Peraturan Kepala BNPB (Perka) Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
- Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang-Wilayah.

Biografi Penulis 1



Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, lahir di Pamekasan tanggal 28 April 1968, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya, saat ini menjabat Rektor Univ. DR. Soetomo periode 2021-2025, sebelumnya Warek 1, Dekan dua periode, Wadep I dua periode, Ketua LKBH, Sekretaris LKBH, dan saat ini masih aktif sebagai Advokat. S1 dan S2 Ilmu Hukum diselesaikan di UII tahun 1992 dan 2004, dan S3 di PDIH UB 2015 dengan predikat Cumlaude. Aktif melakukan penelitian hibah dikti, 2013 dan 2016, hibah buku ajar dari kemenristek dikti, serta telah menulis beberapa buku, dan penulis artikel di beberapa media, menjadi narsum di MKRI, Bawaslu, KPU, MPRRI, KYRI. Jabatan di organisasi sebagai Ketua Pusat Asosiasi Pengajar HTN-HAN (2021-2025), Wasekjen PP APHATN-HAN (2016-2021), Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN DPD Jatim, Ketua Pusat Kajian Konstitusi (PKK) Jatim, Ketua APHAMK Jatim, Ketua Litbang ISHI Jatim, Wakil Ketua LCKI Jatim, dan anggota ISWI Jatim.

Biografi Penulis 2



Dr. Hendro Wardhono, M.Si, dosen (dpk) pada FIA Universitas Dr. Soetomo. Lahir di Sidoarjo, 9 Oktober 1968, Pendidikan S1, S2 dan S3 di FIA Brawijaya jurusan Administrasi Publik, bidang studi *public policy*. Pernah menjabat Wadep III tahun 1999 – 2002, juga pernah menjadi KaProdi Magister Ilmu Administrasi (MIA) tahun 2008 - 2010. Tahun 2014 - sekarang menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana dan Lingkungan (PSBL). Mendapatkan penghargaan tingkat Nasional oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2018.

Biografi Penulis 3



Prof. Dr. Nur Sayidah, SE., MSi., Ak ditetapkan menjadi guru besar oleh Kemendikbud Ristek sejak tanggal 1 Desember 2021. Saat ini menjadi Wakil Rektor IV bidang kerjasama dan promosi di Universitas Dr. Soetomo Surabaya. Pernah menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan pemimpin redaksi Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. Menjabat Kepala Badan Pengawas Internal universitas pada tahun 2015. Lulusan Universitas Brawijaya S1 Akuntansi, dan S3 Ilmu Akuntansi, S2 Sains Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada. Aktif meneliti di bidang *governance*, *corporate finance*, dan *learning model in accounting*. Telah menghasilkan publikasi ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi Pernah menulis dua buku, menjadi instruktur pelatihan manajemen keuangan desa se-Jatim dan menjadi Detaser untuk program Detasering Kemendikbud 2020. Pernah mendapatkan hibah dosen merenung tahun 2019.

Biografi Penulis 4



Priyanto, lahir di Malang, 07 Agustus 1968, pendidikan terakhir S3 Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Memulai karir sebagai dosen Fakultas Ilmu Administrasi Unitomo Surabaya pada tahun 1992. Saat ini menjabat Kaprodi Magister Ilmu Administrasi dan Kepala Pusat Studi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Unitomo Surabaya.

Biografi Penulis 5



Dr. M. Syahrul Borman SH, MH, dilahirkan di Palu tanggal 12 desember 1959 , Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo Surabaya, , Jabatan struktural yang pernah dijabat yaitu sebagai Wakil Dekan I 1988-1992, Pembantu Dekan III 1992-1995, KaLab FH 1996-1997, Pembantu Dekan I 1997-2000, Dekan FH 2000-2004, 2004-2008, Pengurus LKBH LKBH 2008-2012, dan saat ini masih aktif sebagai Advokat. S1 dan S2 Ilmu Hukum dari UNAIR tahun 1985 dan 1997. Kegiatan Tri Dharma dengan melakukan penelitian hibah dikti. Jabatan di organisasi sebagai pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN DPD Jatim. aktif diberbagai organisasi aktif sebagai narasumber di RRI. Jabatan di organisasi saat ini sebagai pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN DPD Jatim.

TATA CARA PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT PENGUNGSIAN ERUPSI GUNUNG SEMERU KABUPATEN LUMAJANG

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.hangtuah.ac.id:8080 Internet Source	5%
2	Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau Student Paper	5%
3	idoc.tips Internet Source	4%
4	fr.slideshare.net Internet Source	3%
5	www.depdagri.go.id Internet Source	3%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

TATA CARA PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DI TEMPAT PENGUNGSIAN ERUPSI GUNUNG SEMERU KABUPATEN LUMAJANG

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

